

## BAB 2

### KEADAAN MASYARAKAT JAWA AWAL ABAD Ke-20

#### 2.1. Kondisi Perekonomian Masyarakat Jawa Pada Awal Abad Ke-20

Kolonialisasi suatu bangsa pada hakekatnya ialah usaha eksploitasi kekayaan dan penindasan terhadap bangsa lain. Tidak terkecuali kolonialisasi yang dilakukan pemerintah Belanda terhadap penduduk Hindia Belanda dengan berbagai cara dan sistem yang pernah diterapkan. Kolonialisasi yang terjadi mengakibatkan kemunduran dalam berbagai segi kehidupan seperti masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan.<sup>6</sup>

Politik eksploitasi terhadap kekayaan bangsa Indonesia dalam bentuk penjajahan secara ekonomi berlangsung pada masa VOC tahun 1602-1800, yaitu dengan menerapkan sistem monopoli dan proteksi guna mengisi perbendaharaan kas negeri Belanda. Namun, politik eksploitasi yang dijalankan pemerintah kolonial ini baru memperoleh sistem yang pasti dan hasil yang lebih baik setelah diterapkannya sistem Tanam Paksa di Jawa pada tahun 1830-1870.<sup>7</sup>

Sistem Tanam Paksa yang diterapkan di Jawa sebenarnya merupakan sistem eksploitasi yang sama dengan sistem yang pernah dijalankan oleh VOC sebelumnya. Bedanya, jika di zaman VOC pelaksanaan penyerahan wajib diserahkan kepada

---

<sup>6</sup> Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1979. hlm. 343.

<sup>7</sup> Ricklefs, M.C, *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999. hlm. 168 dan 190.

kepala rakyat masing-masing daerah tanpa pengawasan yang ketat dari pegawai VOC, maka dalam sistem Tanam Paksa pelaksanaan dan pengawasan untuk sistem tersebut diserahkan kepada pegawai Eropa dari pemerintah kolonial.<sup>8</sup> Dengan demikian, pengaruhnya terhadap penduduk pribumi jauh lebih terasa dibanding pada zaman VOC. Dapat dikatakan bahwa sistem Tanam Paksa ini lebih mirip disebut sebagai sistem perbudakan yang teratur dan rakus, yang kemudian sangat berdampak buruk bagi perkembangan perekonomian bangsa Indonesia.<sup>9</sup>

Dampak sistem Tanam Paksa ini lebih terasa lagi karena dalam pelaksanaannya terjadi berbagai penyimpangan dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Tidak jarang areal yang ditanami untuk komoditi ekspor pemerintah kolonial melebihi seperlima dari tanah yang mereka miliki dan bahkan terkadang meliputi suatu desa tertentu.<sup>10</sup> Disamping itu para penduduk pribumi juga masih harus melakukan *kerja rodi* atau menanggung penderitaannya sendiri yang disebabkan oleh kegagalan panen yang terjadi.<sup>11</sup>

Sistem Tanam Paksa selama empat dasawarsa telah berhasil menutupi defisit yang diderita pemerintah Belanda dan bahkan dapat meningkatkan kemakmuran

---

<sup>8</sup> Sistem Tanam Paksa ialah suatu sistem dimana penduduk harus menyerahkan sejumlah hasil bumi sebagai ganti membayar pajak tanah yang mereka tanam. Biasanya hasil bumi ini merupakan komoditi ekspor yang diinginkan oleh pemerintah kolonial. Penduduk harus menyerahkan dua per lima dari hasil panen utamanya atau sebagai gantinya seperlima dari waktu kerjanya dalam satu tahun. Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme, edisi 2*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992. hlm.13.

<sup>9</sup> Lihat Masyhur Amin, *Saham HOS Tjokroaminoto*, hlm. 8.

<sup>10</sup> Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, dan Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia: Jilid 5*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977. hlm. 8.

<sup>11</sup> Lihat Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, dan Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia: Jilid 5*, hlm. 84.

bangsa Belanda sendiri. Jumlah total dari *batig slot* atau keuntungan yang diperoleh negeri Belanda dari Tanam Paksa telah mencapai angka f. 784 juta, suatu angka yang sangat tinggi pada saat itu.<sup>12</sup> Sementara di pihak lain, beban yang dipikul rakyat bertambah berat. Penderitaan rakyat tersebut kebanyakan disebabkan oleh kerja rodi yang mereka lakukan baik untuk membangun dan memelihara benteng-benteng tentara kolonial maupun juga perawatan infrastruktur berupa jalan, jembatan, dan irigasi. Banyak dari pekerja rodi tersebut kemudian mati karena penyakit dan kekurangan makanan yang disebabkan perawatan kesehatan yang sangat kurang.

Setelah kegiatan tanam paksa ini mulai banyak didengar dan diperbincangkan oleh kalangan tokoh-tokoh Belanda, mereka mempertanyakan apakah penerapan sistem ini sebagai suatu sistem eksploitasi kolonial di bidang ekonomi masih efisien atau tidak. Oleh karena itu, pada tahun 1870 sistem tanam paksa ini dihentikan, sebagai gantinya antara tahun 1870-1900 pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem liberalisme sebagai sistem ekonominya di Hindia Belanda.<sup>13</sup>

Dengan diterapkannya sistem ekonomi ini, berarti tercipta kesempatan bagi kaum liberal Belanda untuk menginvestasikan modal mereka di perkebunan-perkebunan besar di Hindia Belanda secara bebas. Produktivitas perkebunan dan volume perdagangan kemudian berkembang dengan pesat, sehingga terjadi

---

<sup>12</sup> Lihat Sartono Kartodirjo, Marwati Djoened Poesponegoro, dan Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia: Jilid 5*, hlm. 95.

<sup>13</sup> Lihat Sartono Kartodirjo, Marwati Djoened Poesponegoro, dan Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia: Jilid 5*, hlm. 97.

penanaman modal secara besar-besaran.<sup>14</sup> Akan tetapi, di lain pihak nampak begitu jelas bahwa perusahaan-perusahaan swasta ini menunjukkan tanda-tanda yang lebih menekan daripada perusahaan pemerintah, karena Undang-undang Agraria pada kenyataannya hanya melindungi pemilik modal Eropa yang menanamkan modalnya di berbagai perkebunan dan tetap membuka kondisi-kondisi yang menguntungkan bagi mereka, misalnya tenaga kerja yang sangat murah.<sup>15</sup> Dari beberapa kebijakan yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda, baik tanam paksa maupun liberal, pada kenyataannya sangat merugikan perekonomian rakyat Hindia Belanda atau dalam hal ini Jawa. Meningkatnya produktivitas perkebunan dan pertanian memang terjadi begitu pesat. Namun, hal itu hanya menguntungkan satu pihak saja dengan mengorbankan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang makin lama makin terpuruk keadaannya.

Menjelang abad ke-20, kondisi tersebut menggugah kaum politisi Belanda untuk memberikan tekanan agar politik kolonial yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda tidak semata-mata untuk kepentingan ekonomi saja, tetapi juga didasarkan pada perbaikan nasib penduduk pribumi, serta mendidik mereka agar lebih sejahtera.<sup>16</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 1899 muncul ide mengenai *politik etis* yang diprakarsai oleh Van Deventer. Ia mempunyai pengaruh besar

---

<sup>14</sup> Sartono Kartodirdjo, *Kolonialisme dan Nasionalisme di Indonesia Pada Abad 19 Dan 20*. Yogyakarta: Lembaran Sejarah UGM. 1972. hlm. 15.

<sup>15</sup> Lihat Sartono Kartodirdjo, *Kolonialisme dan Nasionalisme*, hlm. 16-17.

<sup>16</sup> Lihat Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia: Jilid 5*, hlm. 28-29.

terhadap politik etis tersebut berkaitan dengan karangannya “Hutang Kehormatan”.<sup>17</sup> Namun, walaupun tujuan awal politik etis ialah membalas budi terhadap penduduk Hindia-Belanda, tetapi pada pelaksanaannya ternyata menyimpan maksud tertentu dari pemerintah Kolonial. Dengan kata lain, politik etis hanyalah upaya pemerintah Kolonial untuk mendapat simpati rakyat dengan tujuan memperkuat kedudukannya di Hindia Belanda. Pemerintah Belanda yang bertindak sebagai penguasa Hindia Belanda ingin terus mempertahankan politik pintu terbukanya untuk menghadapi persaingan besar dalam mencari daerah jajahan dengan negara-negara besar lainnya.

Tindakan pemerintah Belanda tersebut mengakibatkan perkembangan yang cukup pesat dalam bidang industri agraris, pertambangan, dan pengangkutan di Hindia Belanda. Tanah dan murahnya tenaga kerja yang didapat di Hindia Belanda merupakan keuntungan tersendiri bagi negeri Belanda untuk dapat menjalankan usahanya dengan mendirikan berbagai macam perusahaan dengan modal yang sedikit tetapi mendapatkan keuntungan yang besar.

Namun, kemajuan ekonomi yang didapat pemerintah Belanda ternyata tidak menimbulkan pertumbuhan sosial bagi penduduk yang dicerminkan dengan tingkat kehidupan yang semakin rendah. Selain itu, bahkan penduduk semakin bergantung kepada pemilik modal asing sebagai penyewa tanah dan pembayar tenaga mereka. Akibat dari keadaan tersebut yang sangat mencolok ialah perbedaan ekonomi yang

---

<sup>17</sup> Politik Etis adalah politik balas budi yang diterapkan pemerintah Belanda terhadap Indonesia dan menitikberatkan kebijakan tersebut pada bidang perbaikan irigasi, edukasi, dan imigrasi. Lihat Sartono Kartodirjo, Marwati Djoened Poesponegoro, dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia: Jilid 5*, hlm. 35-38.

sangat besar antara golongan asing dan golongan pribumi. Hanya segolongan kecil kaum pribumi yang mendapat kesejahteraan dan kedudukan yang baik pada saat itu, seperti kalangan pamong praja dan pegawai pemerintahan Belanda. Selain itu, rakyat pribumi juga tidak mempunyai pilihan selain menjual tanah-tanah mereka kepada pemerintah kolonial agar pemerintah dapat mendirikan pabrik-pabrik dan membuka perkebunan guna menambah pemasukan kas pemerintah kolonial.<sup>18</sup>

## **2.2. Kondisi Pendidikan Masyarakat Jawa Pada Awal Abad ke-20**

Pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda pada dasarnya bertujuan untuk menjadikan warga negara yang mengabdikan kepada kepentingan penjajah. Dengan kata lain, pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan tenaga-tenaga yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat kedudukan Belanda di Indonesia. Isi dari pendidikan tersebut pun hanya sebatas pengajaran pengetahuan yang dapat membantu Belanda mempertahankan kedudukannya di Indonesia.<sup>19</sup>

Selain itu, dalam bidang ekonomi sistem yang diterapkan pemerintah Belanda dapat dikatakan telah berhasil menciptakan masyarakat Indonesia yang memiliki ketergantungan terhadap pemerintah Belanda. Sedangkan dalam bidang pendidikan,

---

<sup>18</sup> Pabrik-pabrik dan perkebunan dalam hal ini kebanyakan merupakan pabrik gula dan perkebunan teh. Rakyat dipaksa menjual tanahnya kepada pemerintah kolonial dengan diberi *voorschot* awal. Setelah itu walaupun rakyat merasa keberatan karena harganya tidak sesuai dengan perjanjian awal, namun tanah mereka tersebut sudah tidak dapat diambil kembali. Hal ini juga yang nantinya menimbulkan pemberontakan-pemberontakan terhadap tuan-tuan tanah yang beberapa diantaranya ialah orang Tionghoa. *Bintang Timoer*, No.215, 24 September 1927

<sup>19</sup> *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*. Jakarta: Depdikbud. 1993. hlm. 73.

pemerintah Belanda berusaha menjalankan sistem diskriminatif berdasarkan status sosial dan warna kulit.<sup>20</sup> Adanya sistem ini telah menciptakan kesenjangan sosial layaknya seperti tuan dengan majikan yang dapat menghambat perkembangan intelektual bangsa Indonesia.<sup>21</sup>

Keadaan tersebut berangsur-angsur berubah baru pada akhir abad ke-19, setelah tercetusnya politik etis yang menegaskan bahwa kelalaian pemerintah Belanda dalam memajukan tingkat kehidupan rakyat Indonesia sebagai akibat tanam paksa, harus ditebus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, salah satunya dalam bidang pendidikan.<sup>22</sup> Untuk itu sebagai realisasinya, pemerintah kolonial Belanda mulai menerapkan politik pengajaran yang bersifat liberal, dimana tujuan pendidikan bukan lagi hanya untuk mendidik calon pegawai dinas pemerintahan, tetapi mendidik rakyat Indonesia dalam arti umum.<sup>23</sup>

Dengan diterapkannya sistem pendidikan liberal ini, pada tahun-tahun berikutnya pemerintah kolonial mulai mengusahakan pembangunan prasarana sosial dan pendidikan, khususnya lembaga-lembaga pendidikan bagi bangsa Indonesia. Sekolah-sekolah dasar untuk pribumi mulai berkembang. Pada tahun 1907 jenis Sekolah Kelas Dua diperluas dan didirikan Sekolah Kelas Satu dengan pelajaran bahasa Belanda.

---

<sup>20</sup> *Sinar Islam*, No. 44, 6 Juli 1918

<sup>21</sup> Lihat Sartono Kartodirjo, Marwati Djoened Poesponegoro, dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia: jilid 5*, hlm. 97.

<sup>22</sup> Masyhur Amin, *Saham HOS Tjokroaminoto Dalam Kebangunan Islam dan Nasionalisme di Indonesia*. Yogyakarta: Nurcahaya, 1980. hlm. 11.

<sup>23</sup> I. Djumhur dan Dana Suparta, *Sejarah Pendidikan*. Bandung: CV Ilmu. 1976. hlm. 127.

Sekalipun pada periode ini pendidikan pribumi dapat dikatakan telah mendapat angin segar, tetapi ternyata penyusunan dan pelaksanaan pengajarannya tidak terlepas dari hal-hal yang bersifat dualistis dan kurangnya perencanaan sistematis bagi pendidikan pribumi.<sup>24</sup> Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa pendidikan pada masa ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang Belanda atau golongan bangsawan pribumi, bukan untuk memajukan pendidikan rakyat Indonesia secara umum.

Tetapi tanpa disadari pemerintah Belanda, ternyata hal ini mendatangkan keuntungan yang besar bagi bangsa Indonesia. Bagaimanapun juga, pendidikan merupakan sarana untuk menciptakan kaum intelektual yang merupakan tulang punggung dari pergerakan nasional yang akan terjadi di kemudian hari. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh H Agus Salim, sebagai berikut:

Karena pengajaran itu bertambah banjak djuga rakjat-rakjat jang bertambah luas pengetahuan dan pandanganja, jang memperhatikan pergerakan dunia di lain-lain negeri, dan rakjat jang tidak pandai menulis dan membuatja bertambah banjak pula pendengarjanja. Di situlah rakjat bermula berusaha mentjari djalan akan memperdapat hak-hak seperti orang lain-lain di atas dunia ini.<sup>25</sup>

Kemudian untuk menanggapi sistem pendidikan yang dijalankan pemerintah kolonial Belanda, para kaum intelektual yang terdiri dari beberapa golongan, diantaranya

---

<sup>24</sup> Maksudnya ialah adanya dua jenis pengajaran yang berbeda antara pendidikan Belanda dan pendidikan pribumi. Lihat I. Djumhur dan Dana Suparta, *Sejarah Pendidikan*, hlm. 196.

<sup>25</sup> Agus Salim, “*Hak Berserikat dan Berkumpul*”, Panitia Peringatan H. Agus Salim genap berusia 70 tahun, Jejak Langkah H. Agus Salim. Jakarta: Djembatan. 1954. hlm. 106.

nasionalis dan agamis mencoba mendirikan sekolah-sekolah partikular yang dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu:

1. Sekolah Berhaluan Umum, antara lain :

- Taman Siswa.
- Sekolah Sarekat Rakyat.
- Ksatrian Instituut.

2. Sekolah yang Lebih Bernapaskan Islam, antara lain :

- Sekolah-sekolah Sarikat Islam.
- Sekolah-sekolah Muhammadiyah.
- Sekolah-sekolah Nahdlatul Wathan.<sup>26</sup>

Namun, walaupun sekolah-sekolah partikular tersebut telah berdiri, ternyata belum dapat menjangkau masyarakat yang tinggal di pedesaan. Sekolah-sekolah tersebut sebagian besar terletak di kota-kota besar, seperti Surabaya, Yogyakarta, dan Batavia. Adapun sekolah-sekolah yang terletak di pedesaan selain *Volkschool*, sistem pengajarannya masih bersifat tradisional dan beberapa berupa pesantren-pesantren yang materi pengajarannya sebagian besar membahas mengenai agama Islam, bukan pengetahuan umum seperti sekolah-sekolah kolonial umumnya pada waktu itu.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Lihat I. Djumhur dan Dana Suparta, *Sejarah Pendidikan*, hlm. 149.

<sup>27</sup> Pesantren berasal dari kata santri, yang dengan awalan *pe-* di depan dan akhiran *-an*, berarti tempat tinggal para santri. Dengan kata lain pesantren berarti sebuah tempat yang mengajarkan mengenai pola pikir, norma-norma, dan amalan-amalan berlandaskan ajaran agama Islam atau merupakan lembaga pendidikan dan penyiaran agama Islam. Setiap pesantren biasanya dipimpin oleh seorang kyai yang membawahi santri-santrinya. Beberapa diantara pesantren yang ada di Jawa ialah: Pesantren Denanyar (Jombang), Pesantren Cepaka (Surabaya), Pesantren Kencong (Jember), dan Pesantren Kademangan (Bangkalan). Pesantren-pesantren saat itu biasanya mempunyai pengkhususan dalam pembelajaran agama Islam di dalamnya. Ada pesantren yang terkenal dengan ilmu tafsir Al Quran, ilmu Fiqh, dan

Pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajarnya, pesantren-pesantren pada waktu itu tidak mendapat bantuan dari pemerintah kolonial Belanda, berbeda dengan sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial yang di dalam materi pembelajarannya terdapat pelajaran agama Kristen.<sup>28</sup>

Namun, terlepas dari tidak adanya bantuan yang disediakan oleh pemerintah kolonial Belanda, pesantren sebagai pusat pendidikan dan dakwah memainkan peranan penting dalam penyebaran agama Islam hingga pelosok pulau Jawa saat itu. Selain itu, posisi pesantren saat itu juga merupakan sebuah basis independen pembentukan jiwa nasionalis yang berdasarkan Islam bagi para santrinya untuk menghadapi pemerintah kolonial Belanda. Hal ini terbukti bahwa pesantren-pesantren tersebut dapat melahirkan para santri yang di kemudian hari menjadi ulama terkemuka dan mempunyai pengaruh besar dalam usaha pergerakan nasional.<sup>29</sup>

Beberapa kyai tersebut ialah, KH Hasyim Asy'ari, KH Wahab Chasbullah, KH Bisri Syansuri, KH Ahmad Dahlan, KH Mas Mansyur, Kyai Cholil, dll.<sup>30</sup>

Hal tersebut mengakibatkan pemerintah kolonial seringkali mencurigai berbagai kegiatan yang dijalankan oleh pesantren-pesantren pada waktu itu.

---

tata bahasa Arabnya, tergantung dari keahlian kyainya masing-masing. Lihat Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, Hlm. 18-19 dan 65.

<sup>28</sup> *Sinar Islam*, No. 2, 3 Juni 1917.

<sup>29</sup> Istilah *kyai* dan *santri* berasal dari masa pra-Islam di Jawa. Ada yang mengatakan istilah *santri* berasal dari bahasa ismi, yang berarti guru mengaji. Adapula yang berpendapat istilah *santri* berasal dari istilah *shastri* yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab agama Hindu. Sedangkan istilah *kyai* dalam bahasa Jawa dipergunakan untuk tiga jenis gelar yang berbeda: 1. sebagai gelar kehormatan bagi benda-benda yang dianggap keramat, seperti *Kyai Garuda Kencana* sebagai sebutan kereta emas di Keraton Yogyakarta; 2. gelar kehormatan bagi orang-orang tua pada umumnya; 3. gelar yang diberikan masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pemimpin pesantren dan mengajarkan kitab-kitab klasik kepada para santrinya. Lihat Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, hlm. 18 dan 55.

<sup>30</sup> Lihat Choirul Anam, *Pertumbuhan Dan Perkembangan*, hlm. 1.

Keberadaan pesantren pada waktu itu dianggap sebagai sebuah kekuatan yang dapat mengkonsolidasi kekuatan pribumi untuk melawan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah kolonial kemudian merasa perlu untuk membatasi ruang gerak dan perkembangan pesantren pada waktu itu. Salah satu cara yang digunakan pemerintah kolonial ialah dengan mengeksploitasi sumber alam yang ada di lingkungan pesantren, sehingga pesantren tersebut mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan kegiatan-kegiatannya. Cara yang dijalankan oleh pemerintah kolonial ini dapat dimaklumi karena untuk dapat memenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pengajaran di pesantren, tempat tersebut tidak mengandalkan uang sekolah dari para santrinya, namun dari hasil pengolahan tanah mereka dan juga perdagangan. Untuk membalas jasa kyainya, biasanya para santri tidak membayarnya dengan uang, melainkan mereka membantu kyai tersebut baik dalam hal bercocok tanam maupun pekerjaan lainnya yang menjadi mata pencaharian dari pesantren tersebut.<sup>31</sup>

Hal lain yang juga dilakukan oleh pemerintah kolonial adalah dengan menangkap para ulama yang dianggap berbahaya dan dikultuskan oleh masyarakat. Salah satu contohnya ialah Ahmad Sanusi Hal ini sesuai dengan saran dari Snouck Hurgronje bahwa “Syekh dan pengikut-pengikutnya itu merupakan musuh yang berbahaya bagi kekuasaan Belanda, sekurang-kurangnya sama dengan orang-orang golongan Sanusi terhadap kekuasaan Perancis di Aljazair”.<sup>32</sup> Pembatasan terhadap

---

<sup>31</sup> Andree Feillard, *NU vis a vis Negara*. Yogyakarta: LKiS, 1999. hlm. 4.

<sup>32</sup> Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1980. hlm. 29.

gerak dan perkembangan pesantren tersebut juga terlihat dari keengganan pemerintah kolonial untuk menjadikan pesantren sebagai pendidikan alternatif untuk pribumi yang keberadaannya diakui oleh gubernemen.

Sebagai tindak lanjut pembatasan terhadap pesantren, pemerintah Belanda mendirikan sekolah-sekolah pada masa politik etis yang ditujukan untuk golongan elit dan priyayi. Hal tersebut dilaksanakan sebagai upaya pemerintah kolonial untuk merebut pengaruh dari aristokrat tradisional dan kalangan priyayi. Pembatasan terhadap pesantren yang tidak kalah penting lagi ialah dengan diakuinya sekolah *zending* atau sekolah yang dikelola oleh misionaris Kristen dan orang-orang Barat. Hal ini dilakukan sebagai upaya penetrasi terhadap kekuatan Islam atau dalam hal ini pesantren dan pelenyapan agama Katolik warisan Portugis. Langkah ini dikenal dengan istilah *Asimilasi* dan *Asosiasi*.<sup>33</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kehidupan pendidikan masyarakat Jawa awal abad ke-20 belum memadai atau belum mendapat perhatian lebih dari pemerintah kolonial sesuai dengan janjinya mengenai pendidikan dalam politik etis. Pendidikan hanya difokuskan kepada bangsa Belanda atau kaum-kaum elit pribumi yang sekiranya dapat membantu kinerja pemerintah kolonial dalam mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Mengenai lembaga pendidikan Islam seperti pesantren pun saat itu tidak mendapat perhatian khusus berkaitan dengan

---

<sup>33</sup> Asimilasi dalam hal ini mempunyai pengertian bahwa keperluan-keperluan Hindia akan dipenuhi dengan syarat-syarat Barat, sedangkan Asosiasi dalam hal ini mempunyai pengertian bagaimana mengikat negeri jajahan dengan negeri penjajah. Lihat Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam*. hlm. 182.

pemberian bantuan pendidikan, tetapi mendapat perhatian berkaitan dengan bagaimana mengatasi pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran rakyat yang berlandaskan Islam yang dapat menimbulkan jiwa nasionalis mereka untuk menentang pemerintah Belanda.<sup>34</sup>

### **2.3. Kebangkitan Para Ulama di Jawa**

Kebangkitan ulama pada dasarnya merupakan rasa tanggung jawab para ulama untuk mengamalkan ilmu yang telah mereka peroleh melalui proses yang panjang. Pengamalan ilmu tersebut juga tidak lepas dari suatu bentuk kegiatan keagamaan yang kemudian berkembang menjadi sebuah pondok pesantren. Pesantren ialah sebuah lembaga pendidikan Islam di mana para santri dan kyainya berkumpul dalam satu kompleks. Khusus pada pesantren di Jawa, kebanyakan kyai selain berfungsi sebagai pengasuh juga berfungsi sebagai pemilik pesantren tersebut.<sup>35</sup> Para santri juga sangat tunduk kepada kyainya karena mereka menganggap kyai adalah figur yang tidak dapat diragukan lagi kemampuan ilmu pengetahuannya, bahkan para santri menganggap kyainya tersebut sebagai seorang yang sangat dekat dengan Allah SWT dan dapat memahami keagungan-Nya. Dengan demikian, proses kebangkitan

---

<sup>34</sup> Yang dimaksud dalam hal ini ialah mengenai ketakutan pemerintah kolonial Belanda dengan perkembangan Islam pada suatu daerah yang dianggap apabila terlalu fanatik maka dapat membahayakan kedudukan pemerintah kolonial di daerah tersebut. Oleh karena itu pemerintah kolonial berusaha mengatasinya dengan banyak melakukan misi penyebaran agama melalui lembaga pendidikan dan juga berusaha ikut campur dengan membuat peraturan yang berkaitan dengan beberapa ritual yang biasa dilakukan oleh umat islam, seperti dalam hal perkawinan maupun pelaksanaan ibadah haji. Tulisan G.F. Pijper dengan judul *Politik Islam Pemerintah Belanda*. Lihat H. Baudet dan I.J. Brugmans, *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987. hlm. 239-241

<sup>35</sup> Salah satu contohnya ialah pesantren Tebu Ireng milik KH. Hasyim Asy'ari.

ulama dengan pertumbuhan pondok pesantren merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.<sup>36</sup>

Bangkitnya seorang ulama dan tumbuhnya sebuah pesantren pada masa lalu memang telah melalui proses yang sulit. Pada umumnya, syarat seseorang untuk menjadi seorang ulama ialah harus mempunyai kelebihan yang diakui oleh masyarakat lebih dahulu, antara lain kelebihan dalam hal ilmu agama Islam, pribadi yang bersahaja, maupun ketegasan serta keberanian dalam menghadapi segala macam gangguan yang berkaitan dengan pribadi, lingkungan sekitar, dan agamanya.

Tetapi, walaupun telah disebutkan di atas bahwa kebangkitan ulama di Jawa sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan pondok pesantren, masih ada sisi-sisi lain yang juga mempunyai kaitan yang erat dengan timbulnya gerakan kebangkitan ulama di Jawa. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan yang diperoleh masyarakat Jawa saat itu yang masih belum mencukupi. Gerakan kebangkitan ulama ini pada awalnya dipelopori oleh beberapa perhimpunan Islam, diantaranya ialah: Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama.

1. Sarekat Islam didirikan oleh Haji Samanhoedi di Solo pada tahun 1912.<sup>37</sup> Pada awalnya organisasi ini bernama Sarekat Dagang Islam. Dalam anggaran dasarnya, Sarekat Islam mempunyai tujuan untuk memajukan perdagangan, menolong anggota-anggotanya yang susah, memajukan kehidupan kerohanian, meluruskan pendapat-pendapat yang salah tentang Islam, dan memajukan kehidupan

---

<sup>36</sup> Lihat Choirul Anam, *Pertumbuhan Dan Perkembangan*, hlm. 4.

<sup>37</sup> *Oetoesan Hindia*, 21 April 1914

keagamaan sesuai dengan hukum dan kebiasaan Islam.<sup>38</sup> Perkembangan Sarekat Islam dapat dibagi dalam empat bagian. *Pertama*, dari 1912–1916 yang memberi corak dan bentuk dari organisasi tersebut. *Kedua*, dari 1916–1921 yang dapat dikatakan merupakan periode puncak dari organisasi ini. *Ketiga*, dari 1921–1927 yang merupakan periode konsolidasi. Dalam periode ini Sarekat Islam merubah namanya menjadi Partai Sarekat Islam. Partai tersebut bersaing keras dengan Komunis, di samping juga mengalami tekanan-tekanan yang dilancarkan oleh pemerintah Belanda. *Keempat*, dari 1927–1942 yang memperlihatkan usaha partai tersebut untuk tetap mempertahankan eksistensinya di forum politik Indonesia.<sup>39</sup>

2. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta oleh KH Ahmad Dahlan atas saran yang diajukan oleh murid-muridnya dan beberapa orang anggota Budi Utomo untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang bersifat permanen.<sup>40</sup> Perhimpunan ini pada awalnya hanya merupakan sebuah perhimpunan kecil, namun mempunyai tujuan untuk menyebarkan Islam di dalam negeri. Perhimpunan ini kemudian berkembang dengan pesat di pulau Jawa, dan lambat laun mulai mendirikan cabang di beberapa daerah seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Hal tersebut kemudian menyebabkan Muhammadiyah menjadi sebuah perhimpunan keagamaan yang cukup besar di Indonesia pada saat itu. Berdasarkan anggaran dasarnya, perhimpunan ini mempunyai tujuan

---

<sup>38</sup> G.F.Pijper, *Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950*. Jakarta: UI Press, 1984. hlm. 107.

<sup>39</sup> Lihat Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam*. hlm. 114-115.

<sup>40</sup> Lihat Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam*. hlm. 84.

“memajukan pendidikan dan ilmu pengetahuan di Hindia Belanda berdasarkan ajaran Islam dan meningkatkan kehidupan beragama di antara para anggotanya“. Untuk dapat menjalankan cita-citanya tersebut, Muhammadiyah kemudian menerapkan berbagai macam kebijakan, yaitu:

- Mendirikan, memelihara, dan juga membantu lembaga-lembaga pendidikan yang memberikan mata pelajaran umum di samping mata pelajaran tentang dasar-dasar agama Islam.
- Mengadakan pertemuan antaranggota dan para simpatisannya yang bersama-sama membahas soal-soal dalam agama Islam
- Mendirikan dan memelihara, ataupun memberi bantuan kepada tempat peribadatan.
- Menerbitkan atau memberikan bantuan untuk penerbitan buku-buku, piagam-piagam, dan surat-surat kabar yang merupakan media penyebaran agama Islam.<sup>41</sup>

3. Nahdlatul Ulama, didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 atas prakarsa dari KH Wahab Chasbullah yang kemudian mendapat restu dari KH Hasyim Asy'ari. Perhimpunan ini dibentuk sebagai reaksi atas tindakan kaum Wahabi mengenai pemurnian pelaksanaan ajaran Islam di Timur Tengah. Nahdlatul Ulama juga didirikan sebagai wadah untuk mempersatukan langkah para ulama di Jawa dalam pengabdian yang tidak lagi terbatas pada soal

---

<sup>41</sup> Lihat G.F.Pijper, *Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam*, hlm. 108.

pesantren dan kegiatan ritual saja, tetapi lebih ditingkatkan lagi pada kepekaan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, maupun persoalan kemasyarakatan pada umumnya. Keinginan para ulama tersebut terlihat jelas pada rumusan cita-cita dasar di awal berdirinya Nahdlatul Ulama:

“Mengadakan perhoeboengan di antara Oelama-oelama jang bermahzab; memeriksa kitab-kitab sebelomja dipakai oentoeck mengadjar, soepaja diketahoei apakah itoe dari pada kitab-kitab Ahli Soennah wal Djama’ah atau kitab-kitab Ahli Bid’ah; menjiarkan agama Islam berazaskan pada mahzab empat dengan djalan apa sadja jang baik; berichtiar memperbanjak madrasah-madrasah jang berdasar agama Islam; memperhatikan hal-hal jang berhoeboengan dengan masdjid-masdjid, soeraoe-soeraoe dan pondok-pondok, begitoe joega dengan hal ihwalnja anak-anak jatim dan orang-orang jang fakir miskin; serta mendirikan badan-badan oentoeck memadjoekan oeroesan pertanian, perniagaan jang tiada dilarang oleh agama Islam”.<sup>42</sup>

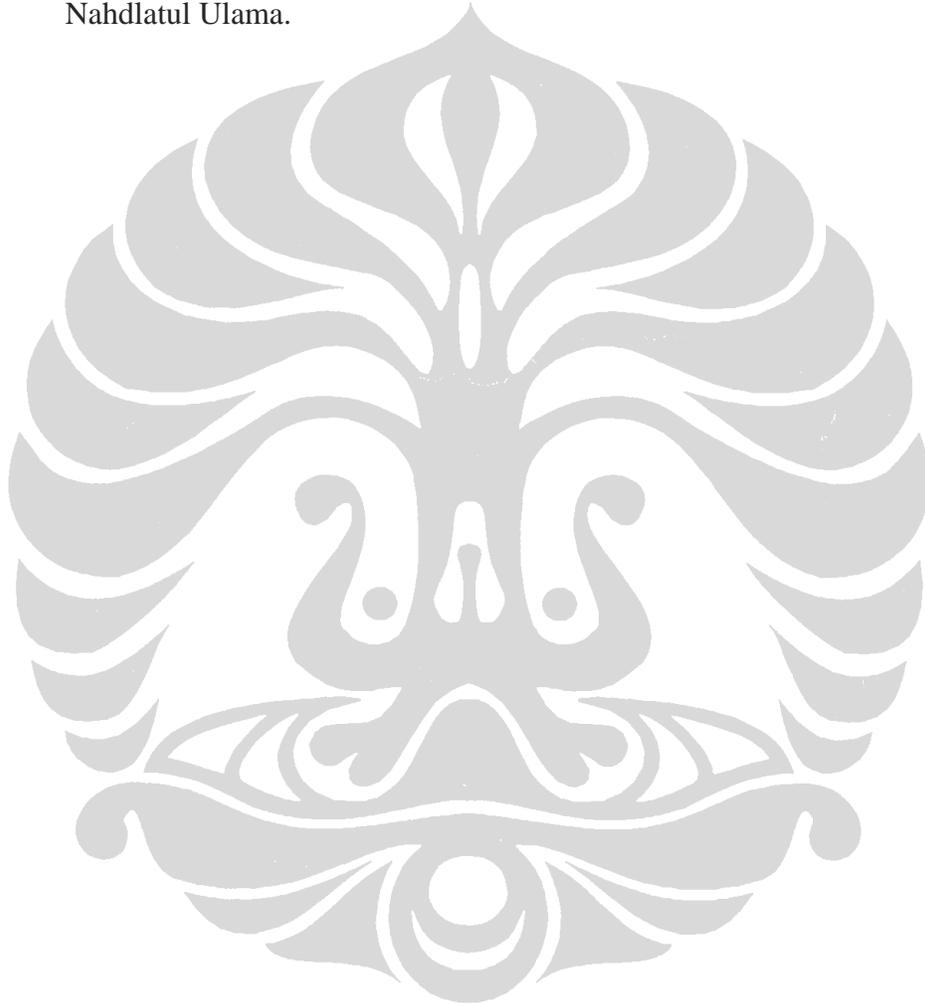
Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat diketahui beberapa pola mengenai kebangkitan gerakan ulama di Jawa dan juga motivasi yang membangkitkan mereka untuk bergerak. Di antara beberapa pergerakan tersebut kebanyakan menyoroti pada bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan.

Hal tersebut merupakan sebuah kewajaran karena ketiga bidang tersebut merupakan sendi-sendi utama tolak ukur kesejahteraan sebuah masyarakat. Mengenai perhimpunan Nahdlatul Ulama yang merupakan perhimpunan yang paling muda diantara Sarekat Islam dan Muhammadiyah, sebenarnya terdapat beberapa lembaga yang didirikan lebih dahulu oleh para pendiri Nahdlatul Ulama (KH Wahab

---

<sup>42</sup> *Statuten Perkoempoelan Nahdlatoel Oelama*, ( 1926: ps. 3 ). Hlm. 2-3.

Chasbullah, KH Hasyim Asy'ari, KH Bisri Syansuri, dll) di antaranya ialah Taswirul Afkar, Nahdlatul Wathan, dan Nahdlatul Tujjar.<sup>43</sup> Ketiga lembaga ini akan dibahas lebih lengkap pada bab berikutnya sebagai tiga lembaga pendahulu lahirnya Nahdlatul Ulama.



---

<sup>43</sup> Taswirul Afkar berarti pergolakan pemikiran, Nahdlatul Wathan berarti kebangkitan tanah air, Nahdlatul Tujjar berarti kebangkitan kaum pedagang. Lihat Saifullah Ma'shum, *KH. Abdul Wahab Chasbullah: Perintis, Pendiri dan Penggerak NU*. Jakarta: Panitia penulisan buku sejarah KH. Abdul Wahab Chasbullah, 1999. hlm. 52-53 dan 56.